



Konflik Dalam Relasi Sosial Masyarakat Jawa Dan Lampung Di Wilayah Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

Cyrli Yunita Miyanti¹, Hartati Sulistyono Rini², Asma Luthfi³✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2017
Disetujui Februari 2017
Dipublikasikan Oktober 2017

Keywords:
Conflict,
Social relations,
Transmigration

Abstrak

Desa Bandar Agung adalah desa transmigrasi di mana ada dua suku yang tinggal di sana yaitu etnis Lampung dan Jawa. Hubungan sosial antara dua suku tidak berjalan dengan baik karena mereka kurang terbuka satu sama lain, di samping kurangnya masyarakat Jawa adaptasi dengan lingkungan baru yang membuat mereka sering bertentangan dengan masyarakat Lampung. Konflik di Desa Bandar Agung disebabkan oleh beberapa aspek seperti aspek sosial yang meliputi kedatangan transmigrasi, stereotip etnis dan juga perebutan kekuasaan antara kepala desa dan sultan. Aspek ekonomi seperti kesenjangan ekonomi yang terjadi antara Jawa dan Lampung serta aspek budaya juga dapat menimbulkan konflik. Masyarakat desa Bandar Agung memiliki cara tersendiri untuk mengelola konflik yakni dengan membatasi pergaulan mereka dengan kelompok etnis yang berbeda, selain itu jika ada konflik mereka akan melakukan musyawarah dan dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pasca-konflik yang bertujuan untuk membuat komunikasi antara Jawa dan Lampung dapat ditingkatkan.

Abstract

Bandar Agung is a transmigration village where there are two tribes living there; they are Lampung and Javanese ethnics. Social relations between the two ethnics are not going well because they are less open to each other, besides the lack of adaptation of Javanese community to the new environment frequently brings them into conflict with Lampung community. Conflicts in Bandar Agung village are caused by several aspects such as social aspects including the arrival of transmigrants, ethnic stereotypes and also the power struggle between the headman and sultan. The economic aspects, such as economic gap between Java and Lampung, and cultural aspects can also lead to the conflict. The villagers in Bandar Agung have their own ways in managing the conflicts; that are by limiting their association with different ethnics, besides if there is a conflict they will hold a deliberation then it is continued by holding a post-conflict activity in order to enhance the communication between Javanese and Lampung community.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: unnessosant@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi kepadatan penduduk seperti yang ada di pulau Jawa yaitu dengan program transmigrasi ke pulau-pulau yang jarang penduduknya seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Transmigrasi ialah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat tetapi masih dalam lingkungan satu negara, transmigrasi merupakan mobilitas penduduk yang kita ketahui seperti migrasi dan urbanisasi, transmigrasi memiliki perbedaan dari migrasi dan urbanisasi karena transmigrasi dalam fungsi, tujuan, serta cara-caranya berbeda dengan migrasi dan urbanisasi.

Transmigrasi secara luas bertujuan dalam pembangunan nasional seperti, Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potensi ekonomi daerah itu. Sebagai contoh meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian, secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, pemerataan persebaran penduduk, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional dan juga meningkatkan taraf hidup rakyat (Hidayah,1997:105). Tujuan awal dari dilakukannya program transmigrasi ialah untuk pemerataan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di daerah pusat (kota) ke daerah yang penduduknya masih rendah. Hal ini berguna juga dalam membuka lapangan pekerjaan baru yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Tujuan dari program transmigrasi diharapkan mampu menjawab permasalahan kepadatan penduduk bahkan mengenai kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi masalah ialah transmigrasi nampaknya masih berkisar pada cara mengatasi faktor yang bersifat fisik-ekonomis, tetapi belum melihat secara khusus bagaimana dampak sosial budaya yang ada. Artinya, dalam merancang kebijakan transmigrasi haruslah mempertimbangkan sampai seberapa jauh kemungkinan dampak yang ada akibat terjadinya hubungan (karena interaksi, komunikasi bahkan relasi sosialnya) secara timbal balik antara masyarakat transmigran dengan masyarakat setempat.

Masalah transmigrasi tidaklah berdiri sendiri namun akan mencakup berbagai interaksi dan saling ketergantungan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem. Interaksi dapat terjadi antara sesama transmigran, transmigran dengan penduduk setempat baik pribadi maupun secara kelompok. Perpindahan penduduk ini ternyata memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi sosial bagi pendatang maupun pribumi. Hal ini terjadi mengingat Indonesia terdiri dari berbagai etnis, beragam budaya dan agama yang tentu memiliki banyak perbedaan antara satu etnis dengan etnis yang lain atau dapat disebut multikultural.

Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultur dan memiliki kekayaan baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya sosial. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh banyak ahli ilmu sosial di Indonesia, tercatat sekitar 300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat dan agama yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada ide atau cita-cita yang terdapat dalam lambang negara yang dilengkapi dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Meskipun dengan semboyan demikian, bukan berarti di dalam masyarakat Indonesia yang multikultural itu tidak terjadi gejala-gejala yang mengarah kepada pepecahan dalam segala bidang. Hal ini merupakan tantangan besar untuk bisa

menyatu dalam sistem penilaian masyarakat yang berdasar pada kaidah-kaidah integrasi dan keselarasan dengan tujuan utama merubah kesejahteraan.

Integrasi adalah suatu kondisi dimana kelompok-kelompok etnis untuk beradaptasi dan menjadi konformitas terhadap kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan budaya mereka sendiri. Integrasi memiliki dua rasa, yaitu ketika kontrol atas konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu dan menciptakan keseluruhan serta menyatukan unsur-unsur tertentu. Integrasi sosial menurut Sorokin (dalam Soekanto, 1982:292), ialah bagian dari proses sosial yang terjadi karena perbedaan fisik, emosional, budaya dan perilaku. Bentuk-bentuk dari integrasi yaitu asimilasi dan akulturasi. Untuk meningkatkan integrasi sosial maka pada diri masing-masing harus mengendalikan perbedaan atau konflik yang ada pada suatu kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya. Selain hal itu setiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Hal ini yang tentu saja diharapkan dapat terlaksana pada masyarakat transmigrasi, dengan adanya transmigrasi masyarakat yang multikultural maka akan tercipta integrasi. Namun pertentangan antar etnis juga tidak dapat dipungkiri di wilayah transmigrasi.

Menurut Raharjo (1995), pertemuan beberapa kelompok etnis di pemukiman transmigrasi akan membuahkan dua kemungkinan, yaitu yang bersifat positif maupun negatif sebagai perwujudan relasi sosial. Hal yang bersifat positif timbul bila pertemuan itu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Hal yang bersifat negatif muncul bila pertemuan beberapa golongan etnis itu menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis, karena adanya perbedaan sikap dalam memandang suatu objek yang menyangkut kepentingan bersama. Hal ini bisa menyebabkan hubungan antar golongan menjadi tegang dan gampang menjurus kepada konflik. Seperti contohnya konflik agraria yang terjadi di pulau Kalimantan yakni Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Selatan.

Transmigrasi penduduk pertama yang terjadi di Lampung dimulai sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Menurut Sayogyo (dalam Swasono 1986:45), Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa pada saat itu Transmigrasi di mulai di wilayah Lampung, lalu kemudian berkembang pada kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Lampung. Para transmigran ini kebanyakan berasal dari Pulau Jawa karena pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa itu sangat pesat sehingga program transmigrasi dirasa sangat sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pertumbuhan penduduk. Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Timur yang merupakan tempat transmigrasi adalah Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribahawono.

Desa Bandar Agung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Sribahawono Kabupaten Lampung Timur. Di desa tersebut masyarakat yang tinggal sangat beragam, kebudayaan mereka juga berbeda-beda. Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa tersebut adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa, tepatnya suku bangsa Jawa secara adalah orang-orang yang hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun temurun. Masyarakat Jawa merupakan mereka yang bertempat tinggal; di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Surakarta dan

Yogyakarta maupun mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa namun masih keturunan Jawa. Masyarakat yang hidup dengan kebudayaan Jawa, menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan bahasa keseharian mereka dalam berkomunikasi, memiliki *unggah ungguh*, serta norma dan nilai yang dianutnya. Begitu pula pada daerah transmigrasi seperti halnya di Lampung, di desa Bandar Agung. Tidak hanya masyarakat Jawa saja yang bertempat tinggal disana tetapi ada juga masyarakat Lampung yakni masyarakat pribumi, meski demikian mereka merupakan masyarakat minoritas di desa Bandar Agung.

Masyarakat pribumi yang bermukim di daerah Lampung dan memiliki garis keturunan dari nenek moyang mereka yakni orang yang bersuku bangsa Lampung serta masyarakat yang hidup sesuai dengan tatanan norma dan nilai budaya Lampung. Masyarakat Lampung memiliki kebudayaan tersendiri yang tentu saja berbeda dengan masyarakat suku bangsa lainnya. Masyarakat Jawa dan Lampung ini hidup berdampingan di Desa Bandar Agung, walaupun mereka berasal dari latar belakang suku bangsa yang berbeda. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki jarak dalam hal komunikasi serta salah satu jalan yang memisahkan antara area rumah masyarakat Jawa dan Lampung, apabila ada salah satu dari masyarakat Jawa maupun Lampung ada yang melanggar maka konflik akan terjadi. Sebelum ada pembatas antara masyarakat Jawa dan Lampung mereka pernah berkonflik sehingga sekarang mereka terbagi ke dalam beberapa bagian seperti blok bagian kanan itu ditempati oleh masyarakat Jawa sedangkan bagian kiri akan ditempati oleh masyarakat Lampung. Segregasi pemukiman tersebut dimaksudkan agar konflik tidak terulang kembali antara masyarakat Jawa dan Lampung di desa Bandar Agung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong,2002:4). Penelitian dilakukan di desa Bandar Agung dengan subjek penelitian ialah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Bandar Agung yang menjadi mediator dan fasilitator dalam konflik dan informan pendukung adalah warga Desa Bandar Agung. Banyaknya informan yang diwawancarai terdiri dari 5 informan utama dan 4 informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan metode triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data (Moleong,2002:178). Analisis data memakai metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bandar Agung merupakan desa berada di kecamatan Bandar Sribhawono kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas pemukiman 6798 ha/m². Desa Bandar Agung berada diketinggian tanah 1500 Mdpl dan memiliki curah hujan sedang, topografi wilayah desa Bandar Agung yakni lereng atau puncak. Desa Bandar Agung memiliki penduduk yang berjumlah 20.652 orang yakni 8003 laki-laki dan 7566 perempuan serta

5.083 kepala keluarga yang kesemuanya adalah masyarakat transmigrasi dan juga pribumi. Desa Bandar Agung terdiri dari 26 RW yang sekarang terbagi ke dalam dua bagian yakni 13 RW milik masyarakat Jawa dan 13 RW lagi milik masyarakat Lampung. Mata pencaharian masyarakat Bandar Agung ialah dari hasil Pertanian ataupun perkebunan. Lahan yang mereka tanami biasanya disebut *ladang*. Masyarakat desa Bandar Agung masih banyak yang lulusan SD hal tersebut dikarenakan pemikiran mereka yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Pola pemukiman masyarakat Desa Bandar Agung terpisah antara masyarakat Jawa dan Lampung.

Relasi Sosial Masyarakat Jawa dan Lampung di Desa Bandar Agung

Masyarakat desa Bandar Agung merupakan desa yang dihuni oleh dua suku bangsa sekaligus namun hubungan antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Sering terjadi konflik antar keduanya baik konflik besar maupun kecil, dari yang bisa terselesaikan dengan sendirinya hingga memakan korban jiwa. Seperti halnya masyarakat desa yang terkenal dengan kerjasamanya yang baik hal yang terjadi justru sebaliknya kerjasama antara masyarakat Jawa dan Lampung hampir tidak pernah terlihat, mereka akan bekerjasama apabila ada perintah dari bapak camat ataupun lurah seperti kerja bakti dalam rangkai ulang tahun desa. Hal itupun terjadi dengan terbaginya mereka dengan sendirinya pada blok-blok tertentu, seperti contohnya bagian depan balai desa akan dibersihkan oleh masyarakat Jawa sedangkan bagian belakang oleh masyarakat Lampung.

Pola tingkah laku yang melekat pada masyarakat Desa Bandar Agung yang kurang terbuka terhadap budaya lain dari masyarakat lokal dan transmigran, tergambar dari tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian tersebut maka bentuk relasi sosial yang terjadi antara transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Desa Bandar Agung adalah: kerjasama, proses komunikasi, sejarah terjadinya konflik, konflik, proses rekonsiliasi setelah konflik, dampak dari relasi sosial transmigran Jawa dengan masyarakat Lampung di desa bandar agung.

Transmigran Jawa melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal hanya jika ada acara bersama itupun karena terpaksa. Kerjasama yang dijalin itu hanya akan terlihat jika pada saat bekerja mereka diawasi langsung oleh kepala desa maupun sultan. Tujuan dari adanya kegiatan bersama tersebut supaya masyarakat Jawa dan Lampung dapat membaaur agar tidak timbul pikiran negatif antara satu sama lain serta komunikasi diantara masyarakat Jawa dan Lampung dapat berjalan lancar.

Masyarakat lokal dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah sesuai dengan dialek yang mereka gunakan, khususnya generasi mudanya. Sehingga hal ini mempersulit para transmigran untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal, dan dengan menggunakan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi maka proses interaksi antar keduanya sulit terjalin dengan baik. Komunikasi yang kurang lancar ini membuat masyarakat Jawa dan Lampung berkonflik yang terjadi pada tahun 2007.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Jawa dan Lampung di desa Bandar Agung bermula pada tahun dipenghujung tahun 2007 yang bermula dari ejekan yang dilontarkan masyarakat Jawa terhadap masyarakat Lampung. Ejekan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat Lampung sebelumnya, namun masyarakat Jawa melotarkan ejekannya hanya dibelakang masyarakat Lampung sehingga masyarakat Lampung bersikap acuh dengan

ejekan tersebut. Pada suatu ketika masyarakat Lampung yang tidak sengaja berpapasan dengan masyarakat Jawa, kemudian masyarakat Jawa mengejek masyarakat Lampung dengan sebutan *mbilung*. Masyarakat Lampung lantas marah dengan ejekan tersebut, masyarakat Lampung merasa bahwa masyarakat Jawa sangat kurang ajar kepada Lampung sebagai masyarakat pribumi. Masyarakat Lampung merasa tidak dihargai sebagai masyarakat pribumi oleh masyarakat Jawa sehingga terjadilah konflik pada masa itu.

Konflik yang terjadi pada masa itu melibatkan hampir seluruh masyarakat Desa Bandar Agung terkecuali perempuan dan anak-anak yang dievakuasi pada ketempat yang lebih aman. Konflik yang terjadi antara masyarakat Jawa dan Lampung ini menelan banyak korban jiwa, rumah masyarakat Jawa dan Lampung yang banyak terbakar, bahkan rumah ibadah juga tak luput dari amukan masa saat konflik. Konflik tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Konflik yang ada di desa Bandar Agung membuat kepala desa yang menjabat pada masa itu dan sultan mengambil keputusan untuk musyawarah. Musyawarah berlangsung cukup lama hingga mencapai kesepakatan damai yang kemudian berujung pada tersegregasinya pemukiman masyarakat Jawa dan Lampung agar tidak timbul konflik nantinya.

Masyarakat Desa Bandar Agung sangat rawan sekali terjadi konflik baik itu konflik fisik maupun konflik non fisik. Konflik yang terjadi seperti perbedaan budaya, nada bicara, serta kebiasaan mereka masing-masing. Contohnya dalam pemilihan kepala desa, pembentukan struktur organisasi, persaingan yang terjadi pada masyarakat dalam bidang ekonomi, yang mana masyarakat Jawa yang lebih menonjol dibandingkan masyarakat lokal. Masyarakat Lampung iri melihatnya dan dapat mememicu timbulnya konflik. Setelah berkonflik masyarakat Jawa dan Lampung akan mengalami proses rekonsiliasi yang biasanya memakan waktu lama.

Rekonsiliasi setelah konflik antara masyarakat Jawa dan Lampung cukup lama, pemulihan kembali bangunan-bangunan yang terbakar akibat konflik berlangsung kurang lebih satu tahun untuk kembali seperti semula. Setelah proses rekonsiliasi selesai mulailah masyarakat Jawa dan Lampung tersegregasi oleh jalan pembatas yang berada di RT.13. Jalan tersebut dapat dilalui oleh masyarakat Jawa dan Lampung, namun pada perbatasan masyarakat sering berkonflik kecil yang biasanya dipicu oleh saling sindir antara ibu-ibu dari masyarakat Jawa dan Lampung. Proses rekonsiliasi yang diharapkan oleh kepala desa dan sultan ialah agar masyarakat diperbatasan menjadi fondasi awal perdamaian antara masyarakat Jawa dan Lampung. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah masyarakat yang tinggal diperbatasan justru sering mengalami konflik kecil. Dampak dari relasi sosial masyarakat Jawa dan Lampung seperti halnya menguatnya ikatan antara kelompok suku bangsa.

Transmigran Jawa melakukan perpindahan ke Desa Bandar Agung bertemu dengan masyarakat yang memiliki adat istiadat dan kehidupan yang baru, sehingga setelah beberapa waktu lamanya mereka tinggal dan berbaur dengan masyarakat lokal, yang tanpa disadari oleh masyarakat menimbulkan efek-efek atau dampak dalam kehidupan masyarakat.

Menguatnya Ikatan Kelompok Sesama Suku Bangsa

Konflik membuat hubungan suku bangsanya semakin erat, hal ini dapat dilihat dari solidaritas mereka semakin tinggi, seperti contohnya tidak ada ketimpangan dalam masyarakat Jawa. Semua orang Jawa menganggap mereka saudara sehingga tidak ada rasa canggung satu sama lain. Namun ada pula hal negatifnya yakni mereka tidak bisa membuka pikiran mereka untuk menerima keberadaan masyarakat Lampung yang memang hidup berdampingan dengan mereka. Hal ini juga memicu adanya konflik suku bangsa di wilayah transmigrasi seperti Desa Bandar Agung.

Kerentanan Konflik Antar Suku Bangsa

Masyarakat Desa Bandar Agung merupakan desa yang rentan akibat masyarakatnya yang terdiri dari dua suku bangsa yakni Jawa dan Lampung. hal ini diperparah dengan prasangka buruk yang timbul diantara kedua suku bangsa ini. Kurangnya komunikasi semakin membuat prasangka buruk diantara kedua suku bangsa ini semakin parah, sehingga konflik merupakan hal yang wajar terjadi di desa Bandar Agung. Masyarakat Desa Bandar Agung juga sudah menyadari adanya kerentanan konflik di desa mereka.

Potensi Konflik yang Ada Antara Relasi Sosial Masyarakat Jawa dan Lampung

Lampung adalah salah satu provinsi Indonesia yang mayoritas dihuni oleh masyarakat pendatang, pada dasarnya penduduk Lampung terdiri dari dua unsur masyarakat yaitu penduduk pribumi dan pendatang. Jika kata pribumi diletakkan pada masyarakat pribumi Lampung maka dapat diartikan sebagian masyarakat asli Lampung yang terlahir dari keturunan darah Lampung dan tinggal di wilayah Lampung sejak nenek moyangnya, bisa juga disebut masyarakat lokal. Sedangkan penduduk pendatang adalah penduduk yang datang ke Lampung kemudian menetap di daerah Lampung. Menetapnya masyarakat Jawa di wilayah masyarakat Lampung menyebabkan timbulnya konflik seperti halnya yang ada di desa Bandar Agung, potensi konflik yang ada di desa Bandar Agung seperti datangnya transmigrasi, *stereotype* etnik, pandangan masyarakat pribumi terhadap masyarakat pendatang, perbedaan pendapat antara masyarakat Jawa dan Lampung di desa bandar agung, transmigran yang kesulitan beradaptasi dengan masyarakat pribumi, dominasi yang dilakukan masyarakat Jawa terhadap masyarakat Lampung, perebutan otoritas antara kepala desa dan sultan melinting, aspek ekonomi serta perbedaan kebudayaan antara masyarakat Jawa dan Lampung.

Transmigrasi di Lampung berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku bangsa, akan tetapi suku bangsa Jawa menjadi suku bangsa yang paling mendominasi transmigrasi tersebut. Letak daerah Lampung yang tidak terlalu jauh dengan Jawa menjadi salah satu alasannya. Hal itu menyebabkan banyaknya suku Jawa di Lampung, seperti halnya di desa Bandar Agung. Suku Jawa di desa Bandar Agung hampir menguasai berbagai lapisan sosial dalam sendi-sendi kehidupan, baik dalam wilayah perdagangan, pertanian, perternakan, serta para pegawai negeri sipil. Penduduknya yang banyak menyebabkan desa Bandar Agung menjadi suku yang besar. Hadirnya transmigran sebagai para pendatang ditengah-tengah kehidupan masyarakat pribumi akan membangun sebuah proses sosial.

Masyarakat Jawa memandang, menilai dan meyakini bahwa penduduk lokal Lampung memiliki perilaku kurang baik, kasar, sewenang-wenang, mau menang sendiri,

arogan, malas dan kurang menerima transmigrasi. Terjadi anggapan bahwa suku Lampung perilaku yang buruk, sewenang-wenang, kasar, kurang menerima transmigran dan malas yang kemudian suku Jawa memberikan pelebelan negatif terhadap sebutan tertentu seperti “*mbilung*”.

Mbilung adalah sebuah lebel yang diberikan orang Jawa kepada orang Lampung yang diibaratkan layaknya tokoh antagonis. *Mbilung* dalam dunia pewayangan digambarkan mengikuti seorang raja yang berwatak jahat atau ksatria yang mengutamakan harta. Pernyataan yang ditulis di atas bukanlah tanpa alasan, label yang diberikan tersebut disebabkan karena terjadinya relasi sosial yang tidak seimbang yang dialami oleh suku Jawa dan penduduk lokal.

Masyarakat Lampung beranggapan bahwa masyarakat transmigran tak ubahnya seperti “penjajah” tanpa ampun. Penduduk asli Lampung menjadi penduduk minoritas di tanah kelahirannya sendiri. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat Lampung tidak menyukai para transmigran dari mulai sektor ekonomi, kekuasaan bahkan pendidikan pun semuanya dikuasai oleh masyarakat Jawa. Masyarakat lokal Lampung hanya menjadi buruh saja. Awal mula mereka menjadi kelompok minoritas karena sebagai pemilik daerah mereka menjual lahan yang mereka miliki kepada masyarakat transmigran hingga akhirnya mereka sendiri tidak memiliki lahan dan harus menggusur tanah milik negara hingga terjadi konflik.

Perbedaan pendapat antara masyarakat asal dan pendatang menjadi salah satu penyebab ditolaknya program transmigrasi di beberapa daerah. Program Transmigrasi yang akan diluncurkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) dianggap akan menjadikan masyarakat asal sebagai kelompok minoritas. Penolakan yang dilakukan oleh warga Program Transmigrasi pada masa pemerintahan saat ini bukan hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga ada pembekalan keahlian bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Banyaknya persoalan di daerah transmigrasi, kebanyakan didominasi oleh benturan antara warga pendatang dan masyarakat asal di daerah setempat. Masyarakat desa Bandar Agung merupakan masyarakat yang heterogen karena daerah transmigrasi. Setiap tempat baru tentunya membutuhkan adaptasi yang baru juga, agar kita dapat membaur dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Desa Bandar Agung merupakan desa transmigran yang terdiri dari dua suku bangsa yakni Lampung sebagai masyarakat pribumi dan juga Jawa sebagai pendatang. Sebagai masyarakat pendatang hendaknya menyesuaikan dengan masyarakat pribumi, namun yang terjadi di desa Bandar Agung justru sebaliknya. Masyarakat Jawa sukar beradaptasi karena mereka tidak sesuai dengan budaya masyarakat Lampung yang dikenal kasar dan tanpa basa basi hal ini yang menyebabkan masyarakat Jawa susah untuk beradaptasi dengan masyarakat Lampung. Lampung merupakan wilayah transmigrasi yang hampir 65,8% masyarakat adalah suku bangsa Jawa sebagai masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat pribumi hanya 12,8% saja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sangat mendominasi wilayah Lampung, begitu pula yang terjadi di desa Bandar Agung. Masyarakat desa Bandar Agung terdiri dari dua suku bangsa yakni Jawa dan Lampung namun hampir semua di dominasi oleh masyarakat Jawa. Dominasi di desa

Bandar Agung meliputi bidang pemerintahan bahkan ekonomi juga masyarakat Jawa yang lebih unggul dari pada masyarakat Lampung, hal ini juga terlihat dalam perebutan kekuasaan antara kepala desa dan sultan melinting.

Pemerintahan yang ada di desa Bandar Agung hampir dikuasai oleh masyarakat Jawa. Pemilihan kepala desa Bandar Agung bersifat adil para kandidatnya diambil dari kedua suku bangsa yang tinggal disana sehingga tidak timbul permasalahan dalam hal pemilihan kepala desa. Kepala desa yang berasal dari suku bangsa Jawa akan cenderung lebih adil dibandingkan kepala desa yang berasal dari suku bangsa Lampung. Dominasi yang dilakukan masyarakat Jawa juga terasa dalam aspek ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat Jawa dan Lampung.

Ekonomi merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, semua hal yang dalam kehidupan manusia sekarang diukur dari tingkat ekonomi, oleh sebab itu banyak hal yang dapat muncul akibat persoalan ekonomi. Permasalahn ekonomi mereka juga memberi jarak. Seperti halnya jika mereka ingin berbelanja sembako maka mereka memiliki tempatnya masing-masing serta penjualnya pula. Jika orang Jawa ingin berbelanja maka mereka akan berbelanja dengan sesama suku bangsa yakni suku Jawa juga. Masyarakat Lampung juga demikian mereka juga akan berbelanja kepada orang padang dan tidak mau berbelanja kepada pedagang yang bersuku bangsa Jawa. Perbedaan tersebut juga dipicu oleh perbedaan kebudayaan antara masyarakat Jawa dan Lampung.

Indonesia terkenal dengan keragaman budayanya. Manusia dan kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa di pisahkan karena di mana manusia itu hidup dan menetap pasti manusia akan hidup sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah yang di tinggalinya. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan yang terus mereka kembangkan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi kebudayaan. Setiap manusia juga memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, itu disebabkan mereka memiliki pergaulan sendiri di wilayahnya sehingga manusia di manapun memiliki kebudayaan yang berbeda masing-masing. Perbedaan kebudayaan disebabkan karena perbedaan yang dimiliki seperti faktor Lingkungan, faktor alam, manusia itu sendiri dan berbagai faktor lainnya yang menimbulkan Keberagaman budaya tersebut Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang masuk ke Indonesia diharapkan dapat dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kebudayaan masing – masing daerah, karena kebudayaan merupakan jembatan yang menghubungkan dengan manusia yang lain. Perbedaan kebudayaan masyarakat Jawa dan Lampung meliputi, bahasa, kesenian, serta religi.

Cara Masyarakat Jawa dan Lampung dalam Mengelola Potensi Konflik yang Ada pada Relasi Sosial Mereka

Masyarakat Jawa dan Lampung memiliki cara dalam mengelola konflik yang ada pada relasi sosialnya seperti membatasi pergaulan, upaya represif, musyawarah, kegiatan bersama pasca konflik serta adanya harmoni dalam masyarakat Desa Bandar Agung. Masyarakat yang tinggal di Lampung sebagian besar adalah transmigran sehingga menyebabkan banyak pertentangan bahkan banyak persaingan antar mereka yang memicu timbulnya konflik. Konflik yang terjadi antar suku ini bisanya dipicu oleh perebutan lahan bahkan permasalahan ekonomi. Masyarakat yang berkonflik ini biasanya akan membuat

segregasi pergaulan baik disektor publik maupun domestik, hal ini terjadi karena mereka sudah memiliki justifikasi yang buruk satu sama lain. Selain membatasi pergaulan masyarakat Jawa dan Lampung juga melakukan tindakan represif.

Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Seperti halnya yang terjadi di desa Bandar Agung, apabila terjadi konflik maka yang berkewenangan untuk mengambil keputusan agar damai adalah kepala desa. Penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya represif sepenuhnya dipegang oleh para pemimpin, seperti halnya yang ada di desa Bandar Agung yakni kekuasaan penuh dipegang oleh kepala desa. Meskipun ada sultan yang juga memimpin namun sultan hanya dibutuhkan jika terjadi musyawarah dalam mengambil keputusan selaku perwakilan dari pihak masyarakat Lampung. Konflik yang terjadi antara masyarakat Jawa dan Lampung terjadi karena kurang keterbukaan kedua suku bangsa tersebut terhadap budaya lain yang muncul disekitar mereka. Jika terjadi konflik upaya-upaya prerogatifpun juga ada, pengambilan upaya prerogatif terjadi bila pada saat ada musyawarah mendadak yang mengharuskan kepala desa mengambil keputusan sendiri pada saat terjadinya konflik, tidak hanya itu kepala desa juga mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Tujuan dari diadakannya musyawarah desa adalah agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang dihadapi dan dirasakan diwilayahnya agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulangnya tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama. Seperti halnya yang ada di desa Bandar Agung, setiap terjadi konflik tentu ada musyawarah untuk menyelesaikannya. Musyawarah tersebut melibatkan kepala desa, perangkat desa dan juga sultan selaku perwakilan dari masyarakat Lampung. Musyawarah tersebut dilakukan di balai desa, musyawarah biasanya dilakukan satu atau dua kali musyawarah untuk menemukan kata sepakat.

Musyawarah setelah konflik akan menghasilkan kata sepakat untuk berdamai dan akan dilakukan salaman oleh kepala desa dan sultan secara simbolis. Musyawarah itu sendiri nanti akan menghasilkan sebuah keputusan untuk melakukan kegiatan bersama setelah konflik untuk merekatkan hubungan antara masyarakat Jawa dan Lampung.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk memupuk perdamaian biasanya akan dilaksanakan setelah musyawarah sepakat dan juga tanggal serta hari yang ditentukan sekaligus pada saat itu juga. Kegiatan ini berupa pertunjukan kesenian Jawa dan Lampung, akan berlangsung selama satu hari penuh. Kegiatan pasca konflik melibatkan seluruh masyarakat Desa Bandar Agung baik suku bangsa Jawa maupun Lampung, tidak ada pembagian yang signifikan antara masyarakat Jawa dan Lampung dalam mengerjakan kegiatan tersebut termasuk pembentukan panitianya. Sebisa mungkin pembentukan panitia bersifat adil tidak ada yang lebih dominan pada acara tersebut, namun pada kenyataanya ketika mereka terjun untuk mempersiapkan acara tersebut mereka bergerombol berdasarkan suku bangsa mereka. Hal ini membuat acara yang dimaksudkan akan berjalan dengan baik untuk membuat masyarakat Jawa dan Lampung berdamai nyatanya tidak terjadi, jika mereka ditegur yang terjadi adalah mereka tidak akan mau melanjutkan acara tersebut.

Ralf Dahrendorf (1959) menyatakan bahwa konflik kelas tak hanya dilandaskan atas upaya mengakses kondisi-kondisi material saja. Konflik sesungguhnya didasari oleh perebutan kekuasaan yang sah, karena relasi sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dari sini terlihat ada tendensi mengadopsi tradisi Weberian yang memandang konflik lebih dari sekadar perkara material. Konflik yang terjadi di desa Bandar Agung merupakan konflik sosial yang terjadi di wilayah transmigrasi, konflik ini dipicu oleh hubungan antara suku Bangsa Jawa dan Lampung yang hidup tidak harmonis. Selain itu perbedaan kebudayaan baik bahasa, kesenian bahkan pola pikir mereka juga semakin memperkeruh hubungan antara masyarakat Jawa dan Lampung di desa Bandar Agung.

Konflik ini juga syarat akan otoritas kepala desa Bandar Agung yang memang memiliki hak penuh atas kekuasaan desa tersebut. Meskipun desa Bandar Agung masih dalam naungan sultan selaku pemimpin masyarakat Lampung namun kekuasaan penuh dipegang oleh kepala desa. Sultan di desa Bandar Agung hanya berperan sebagai penasihat dan perwakilan masyarakat Lampung jika ada musyawarah desa terkait dengan konflik. Konflik desa yang seakan tiada hentinya membuat solidaritas *in group* mereka semakin tinggi dan baik setiap harinya. Hal ini sebagai tameng mereka ketika dihadapkan dengan konflik agar tidak terjadi perpecahan suku bangsa nantinya.

Konflik dalam relasi sosial masyarakat Jawa dan Lampung ini bermula dari program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah guna memecahkan permasalahan kepadatan penduduk di pulau Jawa hingga pada akhirnya masyarakat Jawa yang menguasai provinsi Lampung sebagai wilayah transmigrasi. Masyarakat Lampung sebagai masyarakat pribumi tidak terima karena wilayahnya dikusai oleh masyarakat Jawa sebagai masyarakat transmigran. Masyarakat transmigrasi memang mendominasi wilayah Lampung, masyarakat pribumi jumlahnya lebih sedikit dari pada masyarakat pendatang. Konflik dalam relasi sosial masyarakat Desa Bandar Agung juga didasari oleh otoritas kepala desa yang memiliki hak penuh dalam memimpin desa meskipun ada sultan sebagai penasihat saja. Sultan pada suku Lampung merupakan pemimpin mereka, namun sultan tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dalam desa melainkan hanya sebagai perwakilan masyarakat Lampung jika berkonflik.

Masyarakat Jawa dan Lampung yang berada di desa Bandar Agung sering berkoflik baik itu konflik kecil sampai besar yang memakan korban jiwa. Konflik ini didasari oleh permasalahan ekonomi maupun pemerintahan. Masyarakat Lampung merasa bahwa masyarakat Jawa merupakan penjajah bagi mereka, hal ini tentu saja semakin memperkeruh hubungan antara kedua suku bangsa ini. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penuh seharusnya bisa mencairkan suasana dengan cara membuat acara-acara yang dapat menggabungkan mereka bahkan dalam kepanitiaan pula. Rasa saling terbuka satu sama lain duharapkan bisa membuat konflik yang sudah ada mereda dan mereka dapat hidup berdampingan dengan damai dan tentram.

Harmoni di desa Bandar Agung terjadi dalam bangunan balai desa yang dipadukan antara dua budaya yakni pada gapura awal terdapat siger yang menjadi simbol masyarakat Lampung dan juga pada atas genting kantor kepala desa terdapat ornamen Jawa yang menandakan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat harmoni. Harmoni ini hanya terdapat dalam bangunan desa saja yang pada kenyataannya dikehidupan bermasyarakat

harmoni yang indah ini tidak terlihat. Bangunan pemerintah memang biasanya ada perpaduan antara suku bangsa Jawa dan Lampung yang bertujuan untuk menciptakan harmoni yang dimulai dari pemerintahan. Bangunan yang mencampurkan dua kebudayaan sekaligus ini tidak dapat diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat karena nyatanya kurang keterbukaan antara masyarakat Jawa dan Lampung yang membuat harmoni tersebut hanya sebagai wacana saja.

SIMPULAN

Relasi sosial yang ada di desa Bandar Agung sangat buruk kerjasama dan komunikasi antar kedua suku bangsa ini sangatlah buruk. Walaupun mereka tinggal dalam satu desa namun relasi antar keduanya tidak berjalan dengan baik karena rasa etnosentrisme mereka yang tinggi terhadap budaya masing-masing. Relasi sosial antara masyarakat Jawa dan Lampung di desa Bandar Agung ini berujung konflik yang hampir setiap saat terjadi, dari mulai konflik kecil hingga besar yang menjatuhkan korban jiwa.

Potensi konflik yang ada di desa Bandar Agung ini seperti dipicu oleh permasalahan ekonomi dan dominasi yang dikuasai oleh masyarakat pendatang yakni masyarakat Jawa. Selain permasalahan ekonomi masyarakat Jawa yang ada di desa Bandar Agung juga kurang beradaptasi dengan masyarakat pribumi. Kurangnya mereka beradaptasi sebenarnya juga dipicu oleh kurang terbukanya masyarakat Lampung terhadap masyarakat Jawa sebagai pendatang. Potensi konflik yang lain seperti kesenjangan ekonomi antara masyarakat pendatang dan pribumi bahkan perebutan kekuasaan antara kepala desa dan juga sultan dapat memicu timbulnya konflik.

Masyarakat Bandar Agung memiliki caranya sendiri dalam mengelola konflik seperti halnya mereka membatasi pergaulan satu sama lain. Membatasi pergaulan menurut mereka selain untuk menghindari konflik juga karena mereka memang menghindari adanya konflik. Masyarakat Desa Bandar Agung juga melakukan upaya represif dan musyawarah ketika terjadi konflik yang kemudian akan diadakan kegiatan pasca konflik untuk membuat masyarakat Jawa dan Lampung saling berkomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans, Daeng. 2000. *manusia dan kebudayaan*. Yogyakarta: pustaka belajar.
- Juditha, Christiany. 2015. "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar". *Jurnal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makasar*. Diakses pada senin, 1 februari 2016 08:00:43
- Kuper, Adam dan Kuper Jessica. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Munir, Rozy. 1986. "Transmigrasi: Apa dan Masalahnya" dalam *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.

Soemardjan, P.D.1998. Steriotipetnik, Asimilasi, Integrasi Sosial, Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Swasono Sri Edi. 1986. *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI Press.

Zulyani, Hidayah. 1997. *Ensiklopedia suku bangsa di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.